

GENDER DAN KOMUNIKASI POLITIK AKTIVIS PARTAI ISLAM DI PADANG SUMATERA BARAT.

Abstract

Affirmative action in gender mainstreaming at politic party, is marked with the existence of quota 30% women role in nomination quota of legislative member inviting pro and contra. There are two perspectives in looking at this gender. First, positivistic perspective (or objective) which sees that women have to be given opportunity in political space, its importance if women to have make of policy. Proper women isn't it well-balance position with men in legislative because amount residents of more women compared to men. Second the naturalistic perspective (or subjective). Which my tries to express that women have their own responsible and their readiness of women to enter political world.

Seiring bergulirnya reformasi, bermunculan partai-partai kecil yang mengambil kesempatan untuk menjadikan aktivisnya sebagai wakil rakyat. Selain dari partai kecil, ada juga partai besar "muka lama" yang terus meyakinkan massa untuk tetap mendukungnya. Perjuangan aktivis partai tersebut guna memperjuangkan aspirasi rakyat di lembaga legislatif. Untuk melancarkan jalan aktivis partai sampai menduduki kursi parlemen, terjadilah perebutan pengaruh dan dukungan dari massa pendukung. Bahkan aktivis partai berusaha meyakinkan massa di luar simpatisan yang belum menetapkan akan mendukung siapa dari partai mana untuk mendukung individu secara pribadi. Hal tersebut dikarenakan, Indonesia pada pemilihan umum 2004 bukan lagi melakukan pemilu cara lama yang hanya mencoblos tanda gambar, melainkan pemilihan umum yang mencoblos foto calon legislatif. Dengan demikian kekuatan pesona individu lebih mempengaruhi masyarakat pemilih, disamping nilai jual sebuah nama besar partai.

Semua kegiatan komunikasi politik yang dilakukan oleh aktivis partai pada umumnya bertujuan untuk menawarkan program-program partai demi terciptanya masyarakat madani di Indonesia. Pembangunan Indonesia tersebut tidak terlepas dari pembangunan mental bangsa dan juga pembelajaran demokrasi yang selama ini masih mencari bentuk ideal. Pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan ideal dari masing-masing partai peserta pemilihan umum 2004.

Di Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu dikembangkan kebijakan nasional yang responsif gender. Salah satu strategi

untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa seluruh Departemen maupun Lembaga pemerintah non-departemen di pemerintah nasional, propinsi, maupun kabupaten atau kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan.

Dengan melihat persentase keterwakilan perempuan pada posisi pembuat keputusan yang terlalu sedikit maka keterwakilan perempuan Indonesia perlu ditingkatkan lagi pada posisi pembuat kebijaksanaan dan keputusan. Ada beberapa pemikiran yang berkembang dalam wacana meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lapangan pembuat keputusan, yaitu dengan memperjuangkan sistem kuota dalam berbagai lapangan strategis pembuat keputusan.

Untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai pembuat keputusan adalah dengan memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan, akan tetapi juga mendukung upaya meningkatkan jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga-lembaga politik hingga mencapai jumlah yang signifikan. Hal itu diupayakan agar dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan-keputusan politik

Setidaknya pemerintah telah memberikan peluang untuk perempuan memasuki dunia parlemen yaitu dengan disahkannya Pasal 65 ayat (1) dalam UU Pemilu yang baru saja disahkan berbunyi: *Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*

Tindakan Khusus Sementara (*affirmative action*) dimaksudkan pemerintah untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan diantara laki-laki dan perempuan. Tindakan ini diambil pemerintah dengan anggapan bahwa perlu suatu terobosan terhadap nilai-nilai budaya yang bias gender, yang menempatkan dan mengkondisikan perempuan dalam kedudukan inferior atau subordinasi dari laki-laki. Pemberlakuan kuota diperlukan untuk menghentikan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang sudah berlangsung selama berabad-abad dan ini tidak dianggap sebagai suatu diskriminasi terhadap laki-laki. Pada sisi lain, hal ini merupakan suatu tindakan tercapainya kesetaraan dan keadilan diantara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam struktur dan proses pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga politik.

Harapan dan dukungan bagi adanya peran yang lebih signifikan yang dimainkan oleh para aktivis perempuan, tidak cukup bila hanya didukung oleh

data kuantitatif bahwa angka 30% merupakan bentuk akomodasi terhadap populasi perempuan di Indonesia yang mencapai jumlah 101 juta jiwa. Angka ini setara dengan 51% total penduduk di Tanah Air (Biro Pusat Statistik, 2000).

Angka 30% kiranya juga dilatarbelakangi oleh statistik komposisi anggota DPR, bahwa 52 orang (8,8%) aktivis perempuan di DPR untuk periode 1999-2004 belum juga mampu menyuarakan kebutuhan perempuan nasional secara memadai. Untuk itu, penetapan persentase jumlah perempuan di parlemen dimaksudkan tidak hanya sebagai manifestasi kesetaraan gender, melainkan juga diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup perempuan di Indonesia.

Permasalahannya, penekanan pada unsur besaran kuantitatif semata tidak akan menghasilkan prediksi yang positif bahwa kuota 30% -- atau lebih besar sekalipun -- bagi aktivis perempuan niscaya berpengaruh konstruktif terhadap kondisi perempuan di berbagai dimensi kehidupan. Terlebih lagi pada bidang yang berkaitan dengan peran perempuan di kancah perpolitikan. Jumlah adalah hal penting, namun politik tidak hanya ditentukan oleh faktor kuantitas. Dengan demikian, semestinya ada kenyataan kualitatif yang menegaskan bahwa keterlibatan yang lebih besar perempuan di arena politik adalah tuntutan yang wajar dan sungguh-sungguh merefleksikan kondisi psikologis kaum hawa. Juga, faktor kualitatif inilah yang esensial mendukung perempuan dalam meningkatkan harkat kaum mereka.

Meskipun telah berangsur-angsur menghilang, penilaian bahwa politik adalah ruangan yang (harus) steril dari perempuan masih tetap ada. Jenis kelamin ini diidentikkan dengan segala kesantunan dan kelemahan lembut, sehingga dianggap terlalu mulia -- sebagian kalangan menyebutkan "terlalu lemah" -- untuk terjun ke dalam gelanggang 'perang'. Ini mitos pertama. Perspektif politik yang bernuansakan maskulin ini agaknya turut mempengaruhi rendahnya jumlah aktivis perempuan yang dapat mencapai puncak karir politik di Indonesia umumnya dan di Padang khususnya.

Apabila politik dirumuskan sebagai aktivitas pengelolaan kekuasaan, maka kemampuan dalam mengendalikan situasi adalah modalitas psikologis yang sangat penting. Mereka yang berkecimpung di bidang politik tidak hanya dituntut bermoral, namun juga memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai daya kendali terhadap ruang hidup publik. Keyakinan ini diistilahkan sebagai *control*. Dalam proses pemunculan perilaku, daya kendali merupakan komponen krusial yang menjadi cikal-bakal bagi terbentuknya keahlian (*skill*).

Terlepas dari faktor-faktor eksternal, di dalam diri seorang aktivis idealnya terdapat kemampuan untuk merealisasikan prakarsa (niat) politik menjadi prakarya yang aktual. Ia tidak hanya kaya akan gagasan, namun sekaligus gesit berinisiatif. Semua daya upaya dikerahkan guna mengarahkan situasi sesuai

orientasi yang dikehendaki. Hanya dengan adanya kelengkapan daya kendali, akan timbul sebuah kondisi internal pada diri aktivis yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan, serta tidak hanya disibukkan oleh adu argumentasi tak berkeputusan.

Keberhasilan yang ajeg dalam mengendalikan situasi, pada gilirannya, membangun *internal locus of control*, yakni kepribadian yang ditandai oleh tingginya daya kendali individu terhadap situasi. Aktivis dengan watak seperti ini tidak akan gamang dalam menentukan posisi politiknya. Ia tidak mudah ragu-ragu sehingga cenderung menarik diri dan menjadi aktivis yang 'pendiam', dan juga tidak plintat-plintut sehingga gemar 'bertualang' dari satu partai ke partai politik lain.

Sekali lagi, eksisnya daya kendali menjadi unsur fundamental bagi semua itu. Apakah perempuan memiliki aset psikis ini? Hidup di dalam lingkungan yang hanya membuka celah amat terbatas bagi masuknya perempuan, bisa jadi akan meniadakan daya kendali. Kaum hawa pasrah terhadap laki-laki dalam menentukan hidup mereka sendiri. Lantas, bagaimana para perempuan dapat menunjukkan kegemilangan berpolitik, jika daya kendali pun mereka tak punya? Demikian pandangan klasik.

Pandangan ini ternyata tidak didukung oleh data ilmiah. Penelitian Ralf Schwarzer di paruh akhir dekade sembilan puluhan menemukan hasil yang kontras dengan keyakinan awam. Schwarzer, seorang peneliti gender, berdasarkan riset yang melibatkan 12.840 individu di 14 negara, menyimpulkan bahwa daya kendali adalah kenyataan universal yang terdapat baik pada laki-laki dan perempuan. Khusus di Indonesia, uji psikometrik pada 260 subjek perempuan dan 276 subjek lelaki tidak menunjukkan rerata daya kendali yang berbeda secara berarti. Dengan kata lain, membandingkan para subjek dari kedua jenis kelamin, terlihat derajat yang sama berkenaan dengan persepsi diri mereka tentang daya kendali yang mereka miliki.

Membawa temuan ini ke konteks politik, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya perempuan telah mempunyai potensi psikopolitik yang setara dengan kaum adam untuk berkecimpung di dunia yang kadung dicitrakan sebagai dunia maskulin atau dunia para pejalan. Dan, tidak berbeda dengan yang dimiliki oleh laki-laki, daya kendali (selanjutnya menjadi *collective control* atau daya kendali bersama) pada perempuan ini dapat diberdayakan lebih lanjut sebagai modal menuju puncak prestasi politik.

Implikasi lain, dapat dipahami manakala sejumlah pengamat menunjukkan syakwasangka mereka terhadap latar belakang di balik ide kuota 30% bagi aktivis perempuan di parlemen. Walaupun mengisyaratkan kepedulian terhadap

perempuan, kesan 'pemberian' yang ada pada usulan kuota sukar untuk dihindari. Secara implisit, proposal ini justru menegaskan kembali ketidaksiapan perempuan dalam berkompetisi secara terbuka di gelanggang politik dengan para mitra mereka yang berjenis kelamin lelaki. Perempuan masih dianggap selevel di bawah laki-laki, sehingga layak diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjadi wakil rakyat.

Padahal, jika memafhumi bahwa kedua jenis kelamin mempunyai daya kendali yang setara, maka adalah sepatutnya bagi perempuan dan laki-laki untuk bersaing tanpa ada aturan main yang diskriminatif. Yang perlu dilakukan adalah memperkuat dan memperluas sebaran daya kendali bersama pada perempuan. Alasannya, daya kendali bersama berbanding lurus dengan tingkat kesuksesan. Semakin kuat dan luas daya kendali bersama yang dimiliki perempuan, semakin tinggi keberdayaan yang mereka punya dalam mempengaruhi sistem politik. Selanjutnya, seiring dengan kian dominannya kontribusi perempuan di sektor ini, meninggi pula probabilitas prestasi politik yang dapat mereka raih.

Mitos kedua berkenaan dengan tindak-tanduk aktivis perempuan yang diharapkan. Ketika seorang aktivis perempuan masuk ke politik, termasuk dengan menjadi wakil rakyat, ia tetap tidak terbebas dari beraneka karakter yang dihubungkan dengan keperempuanan.

Ambil contoh Megawati. Panggilan "ibu" terhadap Megawati tidak hanya disebabkan oleh realita bahwa Megawati adalah seorang perempuan. Tetapi, lebih jelas lagi sebelum Megawati menjadi Presiden, sapaan "ibu" mengandung harapan akan kentalnya jiwa pemeliharaan yang dinanti-nantikan masyarakat. Pada saat gemuruh politik kian kacau-balau, Megawati diimpikan sebagai ratu adil yang akan menurunkan hujan pemberi kehidupan dan pemulih persaudaraan.

Kendati harapan adalah sah-sah saja, khayalan akan adanya aktivis perempuan yang 'bersosok lahir batin perempuan' – lagi-lagi – tidak diperkuat fakta. Sebagai misal, bisakah dibuktikan bahwa aktivis perempuan tidak lebih pengasih, tidak lebih responsif terhadap konstituen, bahkan tidak lebih jujur, dibandingkan dengan para aktivis laki-laki.

Paparan di atas, berangkat dari dua mitos yang ada, mensyaratkan adanya proses yang lebih kompleks dalam rangka meningkatkan signifikansi peran politik perempuan di Indonesia. Solusi instan, seperti penetapan kuota, bisa jadi membawa manfaat. Namun, yang lebih krusial lagi adalah pematangan dari bawah, dari tataran masyarakat umum. Yang lebih mendesak bukanlah jumlah aktivis perempuan, melainkan pengkondisian publik, khususnya perempuan, bahwa kesadaran akan pentingnya politik merupakan bagian inheren dari kesadaran mereka sebagai warga bangsa.

Seiring dengan itu, dukungan bagi ditambahnya jumlah anggota parlemen yang berjenis kelamin perempuan seyogianya disertai dengan alasan-alasan yang lebih realistis, ketimbang sekedar memindahkan afeksi-afeksi pribadi ke para aktivis perempuan. Menyematkan citra-citra tradisional perempuan ke para aktivis perempuan tidak hanya mempersulit gerak langkah mereka, tetapi juga akan cenderung memperbesar kekecewaan publik. Jika masyarakat menghendaki terciptanya dunia politik yang tidak berasosiasi dengan gender tertentu, maka harapan ke para aktivis pun seharusnya menghindari pengaitan-pengaitan dengan jenis kelamin mereka. Ringkasnya, medan politik seyogianya tidak *gender oriented*.

Satu orang Tjut Nyak Dien yang memilih untuk melawan, tentu lebih perkasa daripada seribu Cinderella yang menggantungkan nasibnya pada keajaiban. Sejarah Aceh membuktikan bahwa tidak perlu ada pemberian fasilitas dan bujuk rayu *stereotypical* tentang kelemahan, kegemulaian, dan sejenisnya, untuk melahirkan seorang Tjut Nyak Dien.

Demikian juga kenyataan di lapangan. Ketika diamati masyarakat Padang khususnya, dan Sumatera Barat umumnya, ditemukan bahwa kehidupan perempuan dan laki-laki adalah saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki secara umum tidak saling menindas satu sama lain. Jika kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada laki-laki bukan berarti perempuan tidak boleh mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Tidak sedikit perempuan Minang sebagai Bundo Kanduang yang mandiri membiayai kebutuhan keluarga mereka. Apakah mencari nafkah dikarenakan ditinggal mati suaminya, bercerai, atau suami yang tidak bisa menafkahi keluarga.

Pada umumnya perempuan Minangkabau produktif secara ekonomi. Selain ada yang berkarir secara formal di luar rumah seperti menjadi PNS, perempuan Minang juga banyak yang menjadi pengusaha, dari pengusaha kelas kecil, menengah dan besar untuk ukuran daerah. Jika tidak menjadi pengusaha, mereka biasanya berdagang, bertani, beternak dan di beberapa daerah yang mempunyai ke khasan daerah, perempuan banyak berkarya di rumah. Kreasi yang menjadi pilihan adalah menjahit bordir dan menenun kain songket. Secara umum kecenderungan perempuan Minang, tidak mau berpangku tangan menunggu pemberian nafkah dari suami semata, akan tetapi selalu kreatif untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk keluarga

Dari kenyataan sejarah, juga dapat dilihat bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan dan peran masing-masing di masyarakat yang tidak saling memperebutkan. Sebagai contoh kedudukan perempuan adalah bundo kanduang sebagai "*limpapeh rumah gadang*" (pilar rumah adat) yang artinya perempuan

sebagai penyangga dalam keluarga. Bundo kanduang tidak akan bisa tergantikan oleh laki-laki manapun di daratan minang tersebut. Sebagai pilar rumah tangga, bundo kanduang atau perempuan Minangkabau tempat bermusyawarah bagi keluarga mereka. Tanpa ada persetujuan dan pendapatnya tidak bisa suatu keputusan akan ditetapkan. Itu artinya perempuan mempunyai akses dan kontrol yang kuat dalam lingkungan keluarga, ikut memberikan kontribusi dalam membuat keputusan. Apakah keputusan tersebut berkaitan dengan kepentingan domestik rumah tangga tersebut atau kebijaksanaan publik dari keluarga tersebut.

Sebagaimana peran bundo kanduang, demikian juga kedudukan datuak atau ketua adat, juga tidak akan pernah dipegang oleh seorang perempuan. Walaupun tidak ada seorang laki-laki pun pada keturunan dan suku mereka, otomatis mereka tidak ada datuak diistilahkan "batang tarandam". Keadaan tanpa pimpinan adat atau datuak tersebut berlangsung sampai ada diantara keturunan mereka yang laki-laki sehingga bisa menjadi datuak kembali dengan istilah "mambangik batang tarandam".

Kondisi perempuan dan laki-laki yang menjadi mitra seiring dan sejalan tanpa diskriminasi sesuai kedudukan dan peran masing-masing telah menjadi suatu tatanan yang ideal menurut masyarakat Minang. Jarang mereka yang merasa tertindas, dan tidak puas dengan kondisi tersebut. Laki-laki dan perempuan bersaing sehat untuk mendapatkan pekerjaan dan jabatan di lembaga formal, sesuai kapasitas dan kualitas masing-masing individu. Jika seorang perempuan dianggap layak menduduki posisi pada jabatan tertentu dan tidak ada yang bisa menyaingi, maka jabatan tersebut akan diberikan kepada perempuan. Demikian juga sebaliknya jika laki-laki yang lebih layak, maka laki-laki lah yang akan mendapatkan kedudukan tersebut. Satu hal sebagai pertimbangan, jika kedudukan yang sama layak diduduki oleh laki-laki dan perempuan dalam waktu bersamaan, biasanya kedudukan tersebut akan diprioritaskan untuk laki-laki. Hal tersebut disebabkan skala prioritas dari pertimbangan adat dan agama, bahwa perempuan prioritas urusan domestik rumah tangga di rumah dan laki-laki di wilayah publik. Perempuan Minang biasanya menerima keadaan tersebut karena kesadaran akan tanggung jawab dan skala prioritas.

Keadaan yang sudah stabil dalam masyarakat tersebut, justru terganggu dengan adanya kuota 30%. Perempuan justru dipaksakan untuk memenuhi kuota, sementara mereka belum siap untuk itu. Sementara dari pihak laki-laki merasa mereka harus berkompetisi dengan perempuan yang biasanya adalah mitra dalam segala hal bukan lawan politiknya. Laki-laki terpaksa memberikan peluang yang seharusnya diberikan kepada perempuan berdasarkan kemampuannya bukan karena prioritas. Kondisi seperti inilah yang bias gender untuk masyarakat Minangkabau.

Artinya dunia politik seharusnya bebas gender sehingga bisa ditaklukkan oleh siapapun terlepas individu yang memperoleh kesempatan tersebut laki-laki atau perempuan. Dalam dunia politik tidak perlu ada diskriminasi seperti *affirmative action* (tindakan khusus sementara). Karena itu tidak akan membantu banyak

Terlepas dari *affirmative action*, dalam melakukan komunikasi politik, aktivis partai baik laki-laki maupun perempuan akan sama-sama berjuang untuk memenangkan partai mereka. Dalam komunikasi politik non-verbal, ada aktivis Partai Islam mengidentifikasi diri mereka dengan *platform* partai. Tapi dilain pihak, ada juga aktivis partai yang terlepas dari *platform* partai. Di luar kegiatan partai, mereka tidak mau diidentifikasi sebagai pendukung partai tertentu. Identitas diri dalam komunikasi politik non-verbal dari aktivis partai politik Islam dapat dikelompokkan pada dua kelompok besar.

Pertama, kelompok jelas, yaitu orang-orang aktivis partai politik Islam yang secara terbuka dan secara konsisten menunjukkan jatid dirinya di manapun dan dalam posisi bagaimanapun ia berada. Secara simbolik aktivis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki tampilan identitas personal yang telah menjadi *icon* bagi jamaah yang mereka bangun. Dan menjadi pembeda bagi orang-orang yang berada di luar jamaahnya. Semacam *management impression* atau teori pemasaran menyebutnya sebuah *brand image*. Mulai dari cara berpakaian, gaya perbincangan, bahasa, topik obrolan, sapaan, kesibukan aktivitas dan lain-lain sebagainya.

Para laki-laki disebutnya *ikhwan*, sedang yang perempuan dipanggil *akhwat*. Berbeda dengan makna bahasa aslinya adalah *ikhwan* secara bahasa diartikan sebagai saudara laki-laki yang banyak (jamak atau plural). Demikian juga dengan *akhwat* dalam bahasa arab berarti saudara perempuan yang banyak (jamak atau plural). Tapi dalam bahasa sehari-hari aktivis Partai Keadilan Sejahtera kedua makna tersebut lebih kepada makna jamak dan sekaligus makna tunggal atau personal, tetapi khusus untuk mereka yang tergabung sebagai aktivis jamaah.

Dalam percakapan maka panggilan untuk laki-laki adalah *akh* (kependekan dari *akhi*), atau untuk perempuan dipanggil *ukh* (kependekan dari *ukhti*). Jika sudah dekat, perempuan yang lebih kecil menyebut panggilan 'Pak' kepada laki-laki seniornya (bukan AA', Uda, Mas, Abang, Akang dan sebagainya sebagaimana biasanya). Karena panggilan 'Pak' menyiratkan ada jarak diantara mereka, walaupun umur mereka tidak terpaut jauh. Lebih mengesankan tidak terlalu intim dan menunjukkan penghormatan. Selain dari panggilan yang khas,

tidak jarang terdengar lafal-lafal bahasa Arab sepotong-sepotong dari bibir mereka seperti, *afwan, jazakumullah khairan katsira, syukron*, dan banyak lagi.

Secara penampilan, mereka juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Para perempuannya yang biasa dikenal dengan *akhwat* biasanya memakai gamis atau jubah longgar, memakai jilbab yang minimal menutup dada dan biasanya berjilbab besar dan menutupi setengah badan, memakai kaos kaki dan kalau lengan bajunya longgar mereka memakai *manset* sejenis kaos untuk menutupi pergelangan tangan. Dengan kata lain mereka memang benar-benar rapi dalam menutup aurat mereka.

Penampilan laki-laki, terbiasa dengan baju koko (baju Taqwa) yang merupakan baju favorit, atau kemeja lengan panjang. Jarang terlihat pakai baju kaos, kecuali anggota kepanduan yang sedang bertugas. Memakai celana bahan bukan jins, dan longgar. Kebanyakan dari laki-laki aktivis PKS ini terlihat berjenggot, baik yang sekedar jenggot tipis sampai jenggot panjang di kalangan ustadz. Dan kebiasaan mereka adalah menundukkan pandangan.

Jika mereka bertemu sesamanya, maka akan langsung mengucap salam, berjabat tangan, berpelukan erat dan menempelkan pipi (khususnya sering dilakukan *akhwat*). Tetapi jika bertemu antara laki-laki dan perempuan, cukup mengucap salam, tanpa melihat fokus, tanpa berjabatan tangan, apa lagi berpelukan. Mereka menjaga sekali batasan-batasan pergaulan laki-laki dan perempuan.

Majalah yang menjadi bacaan mereka biasanya; SAKSI, TARBAWI, SABILI, UMMI, ANNIDA. Cerita fiksi yang mereka konsumsi untuk dibaca juga sudah banyak yang telah terbit dan di jual di toko buku ternama. Biasanya fiksi-fiksi Islami tersebut karya Helvi Tiana Rosa, Izzatul Islam, Mutmainnah dan banyak lagi pengarang muda yang berbakat. Buku-buku rujukan mereka karya Hasan Al Bana seorang tokoh gerakan *Ikhwanul Muslimun* dari mesir. Kemudian juga karya-karya dari para ulama *harakah* atau pergerakan Islam. Seperti Said Hawa; Said Qutub, Fathi Yakan, Informan 10 Qardhawi. Buku karangan pengarang internal PKS sendiri juga sudah banyak di pasaran seperti buku-buku karangan Abu Ridha, Anis Matta, Didin Hafiduddin, Rahmad Abdullah, Syaiful Islam Mubarak dan lain-lain. Semua tulisan yang mereka baca adalah menunjang perjuangan aktivitas mereka di jalan dakwah.

Ibadah harian, selain kewajiban shalat lima waktu yang mereka lakukan, juga amalan-amalan sunah mereka perbanyak, demi kekokohan pribadi sebagai aktivis dakwah. Amalan harian (*yaumiyah*) berupa; Qiamullail (biasanya shalat tahajud) minimal tiga kali sepekan. Dzikir harian mereka adalah *al-matsurat* yang dibaca setiap pagi dan petang, setelah shalat subuh dan setelah shalat ashar. Target bacaan (*tilawah*) Qur'an minimal satu juz satu hari. Memahami (*Tadabbur*)

Qur'an minimal satu ayat dalam sehari. Menghafal Alqur'an minimal satu ayat per hari. Hafalan Hadits minimal satu hadits per dua pekan. Selalu membaca buku-buku Islam. Mereka melakukan evaluasi (*mutabaah*) terhadap amalan harian (*yaumiyah*) setiap pekan di kelompok *halaqah* mereka.

Selain mereka mempunyai jamaah (organisasi) besar, mereka juga mempunyai jamaah kecil berupa kelompok pengajian. Kelompok pengajian ini sudah berupa jaringan kerja (*network*) yang besar. Pengajian mingguan ini mereka sebut dengan pendidikan (*tarbiyah*) Islamiyah dalam bentuk kelompok (*halaqah*). Kegiatan dalam *halaqah* bermacam-macam. Dibuka dengan membaca Alqur'an, kuliah tujuh menit (kultum) dari salah seorang anggota *halaqah*, dilanjutkan dengan kabar dan masalah dari masing-masing anggota mereka sebut *qodoya*. Dilanjutkan dengan materi dari *murabbi* atau pembina kelompok mereka. Terakhir acara dilanjutkan dengan evaluasi (*mutabaah*) mingguan terhadap ibadah selama sepekan dan membicarakan target-target dakwah dan merancang acara-acara yang akan diangkat. Acara ditutup dengan membacakan do'a *Rabithah*. Begitulan kegiatan *halaqah* setiap pekan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bukanlah partai yang bekerja ketika mendekati pemilu saja, akan tetapi sebuah partai yang melakukan pembinaan dan pengkaderan sepanjang tahun. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya untuk mendokrak perolehan suara akan tetapi memang untuk pembinaan umat. Partai hanyalah sebagai wadah dan tempat menyatukan langkah. Daripada dikatakan sebagai organisasi tanpa bentuk (OTB), sebagaimana yang terjadi sebelum era kepartaian.

Sebelum era kepartaian, dakwah yang berorientasi untuk pembinaan umat, dirasakan aktivitasnya tapi tidak bernama, wajar kalau ada yang mengatakan ini adalah sebuah organisasi tanpa bentuk, atau organisasi bawah tanah (*underground*). Setelah di deklarasikan Partai Keadilan tahun 1998, dan kemudian dilanjutkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka mereka bergerak lebih formal dan bahkan lebih terstruktur. Bukan latah dalam menyambut reformasi, tetapi memang sudah saatnya mereka menamakan gerakan mereka dan memunculkan ke permukaan bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan.

Identitas unik dari aktivis Partai Keadilan Sejahtera yang menjadikan mereka beda dan menonjol dari lingkungan luar mereka adalah banyak anak. Di samping banyak anak, yang menonjol juga pada partai ini adalah mendukung poligami, selama itu bisa adil, menurut mereka. Banyak anak, adalah konsep untuk memperbanyak umat yang bisa dijadikan kader militan. Poligami adalah solusi dalam memecahkan problem perbandingan laki-laki dan perempuan yang

tidak berimbang. Sehingga meminimalisasikan jumlah akhwat lajang yang telah melampaui usia pantas menikah atau bahkan akhwat yang telah memasuki usia terlambat menikah.

Kedua, kelompok samar-samar, yaitu orang-orang aktivis partai politik Islam yang bersedia secara terbuka menunjukkan jatid dirinya ketika berada dalam posisi aman dan menguntungkannya. Dan sebaliknya mereka akan berusaha menutupi dan menyamarkan posisi dan jati dirinya ketika situasi tidak menguntungkan bagi mereka.

Secara umum tidak bisa dibedakan penampilan personal aktivis dua partai Islam PPP dan PBB ini dengan muslim dan muslimah biasa atau yang tidak aktif di partai politik. Semuanya penampilan mereka standar muslim dan muslimah biasa. Perempuan aktivis kedua partai Islam ini berjilbab, tapi tidak ada perbedaan dengan masyarakat luas yang memakai jilbab. Umumnya memakai jilbab tidak terlalu panjang, rata-rata menutupi setengah dada dan ada di antara aktivis Partai Islam itu hanya mengenakan tutup kepala (*ciput*) ditambah selendang. Baju potongan atas bawah, dengan atasan bermodel kemeja, jas, atau baju kurung. Sedangkan bawahannya memakai rok span sebatas mata kaki atau lebih pendek, kulot dan celana panjang. Ada yang memakai model resmi kantor ada yang model santai, sesuai dengan acara yang dihadiri.

Aktivis laki-laki, seperti kebanyakan, memakai kemeja lengan pendek, kadang-kadang batik atau safari. Tidak ada penampilan khusus, semua standar, ada yang berkumis, ada yang tidak berkumis, jarang yang memelihara jenggot. Jika bertemu dengan para aktivis kedua Partai Islam PPP dan PBB ini di luar kantor partainya, maka tidak akan dikenali bahwa mereka adalah seorang politikus atau aktivis, kecuali di panggung kampanye. Tidak terlalu menyolok dan tidak ada identitas yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan.

Dalam kegiatan kepartaian tidak jelas bagaimana rekrutmen anggotanya, tidak ada acara khusus yang diangkat untuk menjaring massa. Kebanyakan massa pendukung kedua partai tersebut adalah komunitas lama. Artinya komunitas yang masih mengenang sejarah-sejarah masa lampau. Baik itu sisa pemilu 1955 dengan organisasi massa Islam Masyumi sebagai massa pendukung PBB maupun massa pendukung partai Islam zaman Orde Baru sebagai pendukung PPP.

Kebanyakan massa pendukung partai politik Islam PPP dan PBB tersebut adalah pemilih lama maksudnya sudah pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya. Dan sedikit di antara mereka yang merupakan pemilih baru, atau para remaja. Hal ini disebabkan kedua partai ini tidak berbaur dengan pemilih pemula.

Dari paparan sebelumnya, jelas bahwa dunia politik seharusnya bebas gender karena merupakan dunia keras penuh intrik dan jebakan. Tidak pernah ada perilaku yang pasti dan permanen. Semua bisa berubah seiring waktu berjalan. Siapa saja

Alqanitah Pohan

yang bisa mengikuti permainan politik tersebut, pintu terbuka lebar bagi siapa saja yang siap bertarung.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A, Navis. 1982. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Gratifi Press.
- Bugi, Mochamad (red) 2004, *Menyelamatkan Bangsa: Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta: Penerbit DPP PK Sejahtera dan Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Damanik, Ali Said. 2002. *Fenomena Partai Keadilan , Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Teraju.
- Devito, Joseph A., 1997, *Komunikasi Antar Manusia*, Jakarta: Profesional Books.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta.: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Furkon, Aay Muhamad, 2004, *Partai Keadilan Sejahtera; Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Teraju (PT. Mizan Publika)
- Ibrahim, Marwah Daud, 1995. *Teknologi Emansipasi dan Transendensi. Wacana Peradaban dengan Visi Islami*, Cetakan II, Bandung: Penerbit Mizan,
- Kamarudin, 2004, *Ada Apa dengan Partai Keadilan Sejahtera; Catatan dari Warga Universitas Indonesia*, Depok: Penerbit Pustaka Nauka.
- Leclerc, Annie. 2000. *Kalau Perempuan Angkat Bicara*. Yogyakarta: Kanisius.
- Liliweri, Alo. 2000. *Politik Komunikasi dan Komunikasi Politik (Suatu Analisis Tentang Isi Pesan Beberapa Surat Kabar di Kupang*. Bandung:YPSDM
- Nimmo, Dan. 1999. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Pearson, Judy Cornella. 1985. *Gender and Communication*. London: Brown Company Publishes
- Schutz, Alfred.1972. *The Phenomenology of the Social World*. Translated by George Walsh and Frederick Lehnert. London: Heinemann Educational Books.
- Yusuf, Almuzzammil, 2003, *Isu Besar Dakwah dalam Pemilu*, Bandung: Percetakan PT. Syaamil Cipta Media.